

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kemajuan yang berarti dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat daerah. Kemajuan ini diharapkan bisa mereduksi pembajakan kekuasaan oleh partai politik yang mempunyai kekuasaan di DPRD. Disisi yang lain, pemilihan kepala daerah secara langsung juga diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi kepada masyarakat (Hanafi, 2014:1). Pilkada merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan ditingkat lokal. Pilkada juga menjadi mekanisme demokrasi yang paling baik dalam pergantian kepemimpinan yang berbasis pada partisipasi masyarakat (Dwiranda & Anggoro, 2020:231). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, peran partai politik tentu sangat penting. Sejauh ini peran partai politik dalam membangun kualitas demokrasi belum sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Rekrutmen calon kepala daerah yang masih buruk, dukungan kandidat yang dianggap terlalu elitis, partai politik dimaknai hanya sebatas kendaraan politik menuju kekuasaan, hingga kurangnya kepedulian partai terhadap suara kritis rakyat. Beberapa poin tersebut menjadi catatan yang saat ini dihadapi oleh partai politik (Hanafi, 2014:1).

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan dengan cara mengirim kader-

kadernya untuk berkompetisi pada pemilihan umum (Aji, Asy'ari, dan A.L.W 2016:7). Secara ideal, dalam proses rekrutmen tersebut partai politik dituntut untuk mencari orang-orang terbaik yang mempunyai kapasitas, integritas yang nantinya akan diusung menjadi calon presiden, anggota legislatif, maupun calon kepala daerah. Peran partai politik dalam menyeleksi kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Partai politik berkewajiban untuk melahirkan kader terbaiknya guna menduduki jabatan elit pembuat kebijakan (Razaqtiar, 2016:359). Namun faktanya, partai politik belum dapat menjalankan fungsi itu dengan maksimal. Pragmatisme partai politik yang lebih mementingkan kekuasaan ketimbang kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat membuat partai politik tidak sungguh-sungguh dalam proses rekrutmen politik.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan desember 2020 seharusnya menjadi momentum yang paling tepat untuk partai politik dalam meyakinkan publik terhadap calon yang mereka dukung. Pemberian dukungan harus di dasari oleh pertimbangan yang matang tentang kualitas dari calon tersebut. Hal tersebut karena kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas dari kepala daerah yang nantinya terpilih. Sehingga peran partai politik di anggap sangat vital dalam menghasilkan kepala daerah yang memang memiliki kapasitas yang mempuni.

Pemberian dukungan yang sering mengabaikan faktor ideologi serta proses kaderisasi yang panjang seharusnya sudah dirubah. Sehingga orientasi dukungan

partai terhadap calon kepala daerah tidak hanya soal memenangkan kontestasi politik, tetapi juga bisa menghasilkan kepala daerah yang memang di inginkan oleh masyarakat luas. Pendapat tersebut cukup beralasan, karena partai politik di Indonesia selama ini cenderung sangat pragmatis dalam memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah. Sebagaimana menurut Ekowati (2019:33), orientasi partai politik yang hanya mementingkan kemenangan dalam setiap kontestasi politik, menyebabkan partai menjadi sangat pragmatis dalam menentukan koalisi dan dukungan kepada calon kepala daerah. Noor (2018:179) menambahkan, idealisme serta ideologi partai yang seharusnya menjadi patokan partai dalam memeberikan dukungan dan membentuk koalisi, sering tersingkirkan karena pragmatisme partai politik.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan desember 2020, melibatkan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara juga terlibat dalam momentum politik 5 tahunan tersebut. Seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen sudah memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan menghasilkan tiga pasangan calon. Dari tiga pasangan calon tersebut, terdapat salah satu calon kepala daerah yang berlatar belakang agama Non-Muslim namun di dukung oleh patai PAN dan PKB yang banyak di akui sebagai partai Islam di Indonesia.

Tabel 1.1. Dukungan Partai Politik Pada Pasangan Calon

No	Koalisi Partai	Pasangan Calon	Agama
1	DEMOKRAT, PERINDO, GERINDRA, PAN, PKB,	Hendrata Thes dan Umar Umabaihi	Non-Muslim dan Muslim
2	PKS, NASDEM, BERKARYA	Zulfahri Abdullah dan Ismail Umasugi	Muslim dan muslim
3	PDIP, GOLKAR, PBB, HANURA, PPP	Hj. Fifian Adeningsi Mus dan H. Saleh Marasabessy	Muslim dan Muslim

Sumber. Di olah penulis

Pemberian dukungan partai PKB dan PAN kepada Hendrata Thes yang merupakan seorang Kristiani, tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Apalagi dukungan tersebut diberikan pada saat kandidat yang lain memiliki latar belakang sebagai agama Islam. Daerah lain di Maluku Utara yang memiliki kasus yang sama terkait dengan dukungan partai Islam untuk kandidat Non-Muslim pada pilkada 2020 yaitu Kabupaten Halmahera Utara. Partai PAN memberikan dukungan kepada Frans Manery yang merupakan seorang Kristiani. Berbedanya, presentase jumlah jiwa berdasarkan agama di kabupaten Halmahera Utara mayoritasnya adalah Kristiani

dengan 60,19%, Islam 39, 50%, Budha 0,01%, Hindu 0,01%, lainnya 0,28% (BPS Halmahera Utara, 2018).

Berbeda dengan Halmahera Utara, presentase jumlah jiwa berdasarkan agama di Kepulauan Sula mayoritasnya adalah Islam dengan 96,93, Kristen 2,76%, Katolik 0,29%, lainnya 0,00% (BPS Kepulauan Sula, 2017). Disisi yang lain, dari ketiga pasangan calon yang telah ditetapkan, dua pasangan calonnya merupakan pemeluk agama Islam. Oleh karena itu fenomena politik yang terjadi di Kepulauan Sula dalam hal dukungan politik tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan latar belakang tersebut sehingga penelitian ini akan mengkaji terkait **“Motif Dukungan Partai Islam Terhadap Kandidat Non-Muslim: Studi Kasus Partai PAN dan PKB pada Pilkada Kepulauan Sula Tahun 2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini merumuskan masalah, bahwa pada dasarnya perbedaan partai secara ideologis tentu akan membedakan dirinya dengan partai yang lain. Jadi jika partai yang berideologi Islam maka perilaku dan program kerja juga harus mengarah kepada kepentingan Islam. Karena itu PAN dan PKB yang merupakan partai politik dengan basis konstituen Islam, seharusnya mempunyai calon kepala daerah dari kalangan umat Muslim. Tapi pada kenyataannya, dua partai ini justru mendukung calon kepala daerah dari Non-Muslim. Dari sinilah penelitian ini akan mengajukan pertanyaan: Mengapa

partai PAN dan PKB harus mendukung Hendrata Thes yang merupakan seorang Kristiani, dan apa motif politik dari partai PAN dan PKB?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa yang menjadi motif politik dari partai PAN dan PKB dalam memberikan dukungan politik kepada Hendrata Thes yang merupakan seorang Kristiani.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang motif politik partai dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bisa menjadi rujukan bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi maupun politisi dalam memahami motif dukungan partai.